

# STRATEGI PEMERINTAH KOTA METRO DALAM UPAYA PENINGKATAN BUDAYA CINTA LINGKUNGAN MENUJU PEMBANGUNAN KOTA YANG BERKELANJUTAN

**Yerri Noer Kartiko**

Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Metro

**Lukman Hakim**

Direktur Bank Sampah Cangkir Hijau Kota Metro

yerrinoerkartiko@gmail.com

## **Abstract**

*Strategic Efforts of Metro City Government for Public Cultural Improvement in Environmental Awareness towards Development based Green Economy Concept. Both government and public have very important role and responsibility in management and preservation of environment. Therefore, in preservation of environment matters, Government and public shall have sinergetic and mutualism relationship. Government shall empower public to take an active role play in effort for preservation of environment. In the other hands, Government shall consider public's needs in formulation and promulgation public policy, strategic planning in preservation of environment. Up to this time, Metro City Government performs any kind of public policy for mindset and cultural set shifting in order to enhance public awareness in environment preservation. These strategics efforts iniated by budgeting arrangement, public empowerment, public policy and law enforcement of environment preseroation*

**Keywords:** Strategic Effort, Government, Public, Cultural Shifting, Environmental Awareness, Environment Preservation.

## **Abstrak**

Strategi Pemerintah Kota Metro dalam Upaya Peningkatan Budaya Cinta Lingkungan. Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat Kota Metro memiliki peranan yang sangat penting serta tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (PPLH). Dengan demikian, dalam hal PPLH, Pemda dan masyarakat selalu bersinergi serta bersimbiosis mutualisme. Pemda senantiasa mendorong masyarakat untuk bersama-sama secara aktif berperan serta dalam upaya PPLH. Selain itu, Pemda selalu mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam perumusan kebijakan, penyusunan program kerja dan strategi terkait dengan PPLH. Sampai dengan saat ini, Pemda telah menerapkan beberapa strategi untuk mengubah pola pikir dan cara pandang masyarakat terhadap lingkungan yang pada akhirnya dapat menumbuhkembangkan budaya cinta lingkungan. Strategi yang dilakukan oleh Pemda ini mulai dari penyusunan anggaran, perumusan kebijakan teknis maupun peraturan perundang-undangan daerah, pembinaan sampai dengan pengawasan serta penegakan hukum PPLH.

**Kata kunci:** Strategi, Pemda, masyarakat, PPLH, budaya, cinta lingkungan

## **Pendahuluan**

Kota secara sosiologis didefinisikan sebagai tempat pemukiman yang relatif besar, berpenduduk padat dan permanen terdiri dari individu-individu

yang secara sosial heterogen.<sup>1</sup> Bintarto menyatakan bahwa dari segi geografis, kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial-ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis.<sup>2</sup>

Sesuai dengan kodratnya, kehidupan manusia tidak dapat terpisahkan dari lingkungan hidup. Terdapat hubungan timbal balik, saling kebergantungan dan saling pengaruh antara manusia dan keadaan lingkungan hidup. Hubungan keterkaitan ini harus terus dikelola dan dikendalikan secara serasi, selaras dan seimbang secara berkesinambungan. Jika tidak, dapat dipastikan secara singkat dapat menimbulkan masalah bencana. Salah satu contohnya adalah semakin banyaknya penambahan jumlah manusia, semakin banyak jenis kegiatan serta gaya hidup manusia, semakin besar pula volume sampah serta semakin terbatas/berkurang pula lahan-lahan pembuangan sampah. Contoh lainnya adalah peningkatan jumlah penduduk Indonesia dapat menyebabkan meningkatnya alih guna lahan-lahan pertanian/produksi biomassa menjadi sarana dan prasarana penunjang kehidupan manusia, seperti: perumahan, pabrik/kawasan industri, pasar/pusat perbelanjaan, hiburan dan lain-lain.

Bintarto<sup>3</sup> mengatakan bahwa kemunduran lingkungan kota yang juga dikenal dengan istilah "*Urban Environment Degradation*" pada saat ini sudah meluas di berbagai kota di dunia, sedangkan di beberapa kota di Indonesia sudah nampak adanya gejala yang membahayakan. Kemunduran atau kerusakan lingkungan kota tersebut dapat dilihat dari dua aspek:

1. Dari aspek fisis, (*environmental degradation of physical nature*), yaitu gangguan yang ditimbulkan dari unsur-unsur alam, misalnya pencemaran air, udara dan seterusnya.
2. Dari aspek sosial-masyarakat (*environmental degradation of societal nature*), yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh manusianya sendiri yang menimbulkan kehidupan yang tidak tenang, tidak nyaman dan tidak tenteram.

Bencana-bencana yang terus menimpa belakangan ini dan kian memburuk menandai padamnya kearifan menuju ke arah Tuhan, manusia, dan alam semesta yang ketiga-tiganya menjadi pusat episentrum ekosistem. Salah satunya dalam matsnawinya Jalaluddin arRumi, dalam salah satu pusinya ia mengungkan: "*engkau wahai alam adalah mikrokosmos, namun pada hakikatnya engkau adalah makrokosmos. Tampaknya ranting itu tempat tumbuhnya buah, padahal ranting itu justru tumbuh demi buah*".<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Sarlito. WS, *Psikologi Lingkungan*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 1992), hal. 40

<sup>2</sup>Bintarto, *Interaksi Desa-Kota*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1989), hal 34

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 36

<sup>4</sup> Lihat Anil Agarwal, et.al., *Hinduism and Ecology: The Intersection of Earth, Sky, and Water*. 2000,

Konservasi lingkungan dapat didekati melalui akar-akar kearifan yang bersumber dari tradisi filsafat dalam hubungannya dengan lingkungan yang dalam hal ini dimaksudkan sebagai kearifan-kearifan yang berakar dari tradisi tasawuf dan teologi. Meski antara filsafat dan ekologi memiliki dasar-dasar pijakan yang berbeda, tetapi yang dicari adalah titik-titik temu dari keduanya yang dapat mendorong spirit konservasi terhadap lingkungan berupa nilai-nilai moral etika, kearifan, cinta, dan kebajikan.<sup>5</sup>

Menjaga kelestarian ekologi menurut Yusuf Qardhawi merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut.<sup>6</sup> Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.<sup>7</sup>

Dalam berbagai contoh permasalahan kota yang dijelaskan di atas, pemerintah sebagai *leading sector* mempunyai peran untuk mengajak masyarakat agar peduli dengan lingkungan hidup. Kepedulian terhadap lingkungan harus dibangun bersama dengan kesadaran warga kota. Artinya, pembangunan kota yang ramah manusia harus bersamaan dengan peningkatan kesadaran manusia atas lingkungan tempat tinggalnya.

Dalam konteks kota Metro, maka *leading sector* untuk meningkatkan budaya cinta lingkungan adalah kantor lingkungan hidup, dinas kebersihan dan berbagai dinas terkait. Kerjasama memberikan sosialisasi untuk menjaga kebersihan kota adalah gotong royong yang harus terus dilakukan. Lalu apa saja yang telah diupayakan oleh pemerintah kota Metro untuk mewujudkan budaya cinta lingkungan masyarakat kota Metro.

### Sejarah Kota Metro

Kota Metro (Had Lapping: *ḥad lapping*) (secara sejarah dikenal dengan nama Trimurjo) adalah salah satu kota di Provinsi Lampung. Berjarak 52 km dari Kota Bandar Lampung (ibukota provinsi),<sup>8</sup> kota ini merupakan kota terbesar kedua di provinsi tersebut. Sebelum menjadi kota otonom, Metro merupakan kota administratif yang berfungsi sebagai ibukota Kabupaten Lampung Tengah hingga 1999. Dan kini, Kota Metro sedang melakukan pembenahan dan pengembangan kota yang lebih maju seiring dengan terintegrasinya Exit Tol Trans Sumatera Bakauheni-Terbanggi Besar di Batanghari Ogan yang menuju ke Kota Metro dan Kota Metro merupakan target cetak biru Dinas Pekerjaan Umum Pusat sebagai Kota Metropolitan setelah Bandar Lampung.

<sup>5</sup> Lihat Mudhofir Abdullah, *Al-Qur'an & Konservasi Lingkungan* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hal. 185-186.

<sup>6</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2000), hal. 39

<sup>7</sup> *ibid*

<sup>8</sup> <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/geografislj.php?ia=18&is=34>, diakses 12 Oktober 2016

Sejarah kelahiran Kota Metro bermula dengan dibangunnya sebuah induk desa baru yang diberi nama Trimurjo. Sebelum tahun 1936, Trimurjo adalah bagian dari Onder Distrik Gunungsugih<sup>9</sup> yang merupakan bagian dari wilayah Marga Nuban. Kawasan ini adalah daerah yang terisolasi tanpa banyak pengaruh dari penduduk lokal Lampung.<sup>10</sup> Namun, pada awal tahun 1936 Pemerintah kolonial Belanda mengirimkan migran orang-orang Jawa (kolonis) ke wilayah ini untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan mengurangi kegiatan para aktivis kemerdekaan. Kelompok pertama tiba pada tanggal 4 April 1936.

Pada tanggal 9 Juni 1937, nama daerah itu diganti dari Trimurjo ke Metro dan pada tahun yang sama berdiri sebagai pusat pemerintahan Onder Distrik (setingkat kecamatan) dengan Raden Mas Sudarto sebagai asisten kepala distrik (asisten demang) pertama. Onder Distrik dikepalai oleh seorang Asisten Demang, sedangkan Distrik dikepalai oleh seorang Demang. Sedangkan atasan dari pada Distrik adalah Onder Afdeling yang dikepalai oleh seorang Controleur berkebangsaan Belanda. Tugas dari Asisten Demang mengkoordinasi Marga yang dikepalai oleh Pesirah dan di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang Pembarap (Wakil Pesirah), seorang Juru Tulis dan seorang Pesuruh (Opas). Pesirah selain berkedudukan sebagai Kepala Marga juga sebagai Ketua Dewan Marga. Pesirah dipilih oleh Penyimbang-penyimbang Kampung dalam Marganya masing-masing.

Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang peresmiannya dilakukan di Jakarta pada tanggal 27 April 1999. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Metro pada mulanya dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 yang terdiri dari 9 Dinas Otonom Daerah, yaitu: 10 Bagian Sekretariat Daerah, 4 Badan dan 2 Kantor. Dalam perkembangan berikutnya, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Pemerintah Daerah Kota Metro melakukan penataan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Metro secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah, terdiri dari:
  1. Asisten I/Pemerintahan, meliputi Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Humas dan Protokol.
  2. Asisten II/Pembangunan, meliputi Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan.

---

<sup>9</sup> Sudarmono, Edi Ribut Harwanto, ed. *Metro: Desa Kolonis Menuju Metropolitan [Metro: A Colonial Village Becoming Metropolitan]* (dalam Indonesian). Metro, Indonesia: Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Metro, 2004, hal. 18

<sup>10</sup> Sudarmono, Edi Ribut Harwanto, ed., 2004, hal. 24

3. Asisten III/ Administrasi, meliputi Bagian Organisasi, Bagian Keuangan Bagian Perlengkapan dan Bagian Umum.
2. Sekretariat DPRD, terdiri dari:
  1. Bagian Persidangan
  2. Bagian Hukum
  3. Bagian Keuangan
  4. Bagian Umum
3. Dinas Daerah, terdiri dari:
  1. Dinas Pekerjaan Umum
  2. Dinas Kesehatan
  3. Dinas Pendidikan
  4. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
  5. Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup
  6. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
  8. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
  9. Dinas Pertanian
  10. Dinas Pasar
  11. Dinas Pendapatan Daerah
4. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:
  1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  2. Inspektorat Kota Metro
  3. Badan Kepegawaian Daerah
  4. Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
  5. Rumah Sakit Umum Ahmad Yani
  6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
  7. Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Terpadu
  8. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
  9. Satuan Polisi Pamong Praja

### **Pemerintahan**

Kota Metro dipimpin oleh seorang Walikota. Dikarenakan keadaan dan status wilayah yang ada di Kota Metro. Saat ini, jabatan wali kota Metro dijabat oleh Achmad Pairin dengan jabatan wakil wali kota dijabat oleh Djohan Pahlawan.

### **Sebelum 1986**

Sebelum menjadi kota administratif pada tahun 1986, Metro berstatus kecamatan yakni kecamatan Metro Raya dengan 6 (enam) kelurahan dan 11 (sebelas) desa.

Adapun 6 kelurahan itu adalah:

1. Kelurahan Metro
2. Kelurahan Mulyojati

3. Kelurahan Tejosari
4. Kelurahan Yosodadi
5. Kelurahan Hadimulyo
6. kelurahan Ganjar Agung

Sedangkan 11 desa tersebut adalah:

1. Desa Karangrejo
2. Desa Banjar Sari
3. Desa Purwosari
4. Desa Margorejo
5. Desa Rejomulyo
6. Desa Sumbersari
7. Desa Kibang
8. Desa Margototo
9. Desa Margajaya
10. Desa Sumber Agung
11. Desa Purbosembodo

### **1986 sampai dengan 2000**

Atas dasar Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1986 tanggal 14 Agustus 1986 dibentuk **Kota Administratif Metro** yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan Bantul yang diresmikan pada tanggal 9 September 1987 oleh Menteri Dalam Negeri.

Pada perkembangannya lima desa di seberang Way Sekampung atau sebelah selatan Wav Sekampung dibentuk menjadi satu kecamatan, yaitu kecamatan Metro Kibang dan dimasukkan ke dalam wilayah pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana (sekarang masuk menjadi Kabupaten Lampung Timur). Dan pada tahun yang sama terbentuk 2 wilayah pembantu Bupati yaitu Sukadana dan Gunung Sugih.

Dengan kondisi dan potensi yang cukup besar serta ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kotif Metro tumbuh pesat sebagai pusat perdagangan, pendidikan, kebudayaan dan juga pusat pemerintahan, maka sewajarnya dengan kondisi dan potensi yang ada tersebut Kotif Metro ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Metro.

Harapan memperoleh Otonomi Daerah terjadi pada tahun 1999, dengan dibentuknya Kota Metro sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang diundangkan tanggal 20 April 1999 dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 di Jakarta bersama-sama dengan Kota Dumai (Riau), Kota Cilegon, Kota Depok (Jawa Barat ), Kota Banjarbaru (Kalsel) dan Kota Ternate (Maluku Utara).

Kota Metro pada saat diresmikan terdiri dari 2 kecamatan, yang masing-masing adalah sebagai berikut:

Kecamatan Metro Raya, membawahi:

1. Kelurahan Metro
2. Kelurahan Ganjar Agung
3. Kelurahan Yosodadi
4. Kelurahan Hadimulyo
5. Kelurahan Banjarsari
6. Kelurahan Purwosari
7. Kelurahan Karangrejo

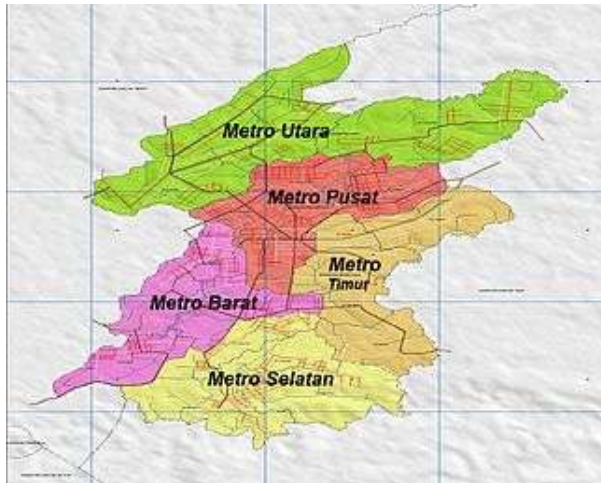
Kecamatan Bantul, membawahi:

1. Kelurahan Mulyojati
2. Kelurahan Tejosari
3. Desa Margorejo
4. Desa Rejomulyo
5. Desa Sumbersari

### 2000 sampai sekarang

Kota Metro terbagi atas 5 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 kecamatan yang meliputi 22 kelurahan.

1. Metro Barat: 11,28 km<sup>2</sup>
2. Metro Pusat: 11,71 km<sup>2</sup>
3. Metro Selatan: 14,33 km<sup>2</sup>
4. Metro Timur: 11,78 km<sup>2</sup>
5. Metro Utara: 19,64 km<sup>2</sup>



*Gambar Peta Administrasi Kota Metro*

### Kecamatan Metro Pusat

1. Kelurahan Metro
2. Kelurahan Imopuro
3. Kelurahan Hadimulyo Timur
4. Kelurahan Hadimulyo Barat

## 5. Kelurahan Yosomulyo

## Kecamatan Metro Timur

1. Kelurahan Iringmulyo
2. Kelurahan Yosodadi
3. Kelurahan Yosorejo
4. Kelurahan Tejosari
5. Kelurahan Tejoagung

## Kecamatan Metro Barat

1. Kelurahan Mulyojati
2. Kelurahan Mulyosari
3. Kelurahan Ganjar Asri
4. Kelurahan Ganjar Agung

## Kecamatan Metro Utara

1. Kelurahan Banjar Sari
2. Kelurahan Karang Rejo
3. Kelurahan Purwosari
4. Kelurahan Purwoasri

## Kecamatan Metro Selatan

1. Kelurahan Sumbersari
2. Kelurahan Margorejo
3. Kelurahan Margodadi
4. Kelurahan Rejomulyo

**Kondisi dan Masalah Lingkungan Hidup Kota Metro**

Kota Metro merupakan salah satu daerah tingkat II di Propinsi Lampung, hasil pemekaran Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999. Secara astronomis, Kota Metro terletak pada 105°17' - 105°19' BT dan 5°6' - 5°8' LS.<sup>11</sup> Sedangkan berdasarkan sudut pandang geografis, batas-batas Kota Metro adalah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur;
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur; dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah.

Luas wilayah Kota Metro sekitar 6874 hektar, yang terdiri atas:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Lahan pemukiman     | :1518.70 Ha                             |
| 2. Lahan non-pertanian | : 1948.48 Ha (termasuk sempadan sungai) |
| 3. Lahan sawah         | : 2973.45 Ha                            |
| 4. Lahan kering        | : 169.47 Ha                             |
| 5. Perkebunan          | : 125.90 Ha                             |

---

<sup>11</sup> Metro Selayang Pandang, <http://info.metrokota.go.id/selayang-pandang/>, diakses 18 Oktober 2016



#### 6. Hutan dan ruang hijau terbuka :138.00 Ha

Selain itu, di Kota Metro masih terdapat lahan kritis seluas 860 Ha, yang terletak di Kecamatan Metro Timur dan Metro Utara.

Kota Metro, sebagaimana pula kota-kota lainnya yang berada di Indonesia, menghadapi masalah yang relatif sama meskipun tingkat intensitasnya yang berbeda. Masalah-masalah tersebut antara lain: sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, limbah industri, limbah yang berasal dari tempat pelayanan masyarakat seperti rumah sakit, rumah bersalin, pasar, pusat perbelanjaan dan pertokoan, hotel/penginapan, rumah makan/restoran. Secara umum, dapat dikatakan bahwa Kota Metro masih menghadapi masalah terkait dengan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### **Identifikasi Masalah dan Tantangan Lingkungan Hidup Kota Metro**

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Kota Metro menghadapi masalah terkait dengan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa contoh nyata yang terjadi di Kota Metro adalah masih banyaknya pelaku-pelaku kegiatan industri dan pelayanan masyarakat seperti pabrik tahu/tempe, pabrik kecap, bengkel, penggilingan padi, peternakan, hotel/penginapan, rumah sakit, rumah bersalin yang masih berpotensi untuk melakukan pencemaran lingkungan, baik udara, air dan tanah. Salah satu hal yang menyebabkan masalah ini adalah belum terbangunnya instalasi pengolahan air limbah di masing-masing tempat tersebut. Selain itu, masalah juga terjadi di masyarakat umum, seperti: pembuangan sampah (termasuk limbah bahan berbahaya beracun, seperti limbah medis) yang belum pada tempatnya, pembakaran sampah, sampah-sampah yang belum terpilah dan terolah dengan baik.

Menghadapi berbagai masalah di atas, tidak lantas membuat Pemda Kota Metro berputus asa, namun sebaliknya menjadikannya sebagai sebuah pelajaran yang sangat penting dan berharga. Selanjutnya, Pemda Kota Metro melakukan analisis permasalahan, untuk menentukan akar penyebab masalah dan metode penyelesaiannya yang paling efektif dan efisien sesuai dengan skala prioritas di Pemda Kota Metro.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, akar permasalahannya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya usaha pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini dilatarbelakangi pula oleh pemikiran dan fakta-fakta bahwa: (1). Pada umumnya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor pada awalnya disebabkan oleh adanya penurunan kualitas lingkungan hidup; (2). Serendah apapun penurunan kualitas lingkungan hidup dan separah apapun tingkat kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup pada awalnya disebabkan oleh ulah manusia yang tidak baik; (3). Seburuk apapun ulah atau perilaku manusia pada awalnya dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman yang dimilikinya; (4). Pada umumnya kesadaran dan pemahaman manusia dapat dipengaruhi dan mempengaruhi budaya; (5).

Budaya dapat diubah. Dengan demikian, Pemerintah daerah Kota Metro menetapkan dan menerapkan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara efektif dan efisien. Strategi ini diharapkan dapat menghasilkan masyarakat Kota Metro secara menyeluruh di setiap tingkat elemen dan lapisan, memiliki budaya cinta lingkungan sehingga tercipta pembangunan kota yang berbasis *green economy*.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan pada masyarakat kota, yang cenderung kurang dapat menyesuaikan diri dan individualistis, sangat diperlukan adanya sarana guna merubah kondisi tersebut, yaitu perlunya pendidikan sosial bagi para penghuni maupun calon penghuni kota. Pengertian umum "pendidikan sosial" yaitu suatu upaya memberikan bekal dan wawasan berupa konsep penyesuaian diri sebagaimana dikemukakan Cole<sup>12</sup>, yang salah satunya mencakup dimensi perkembangan sosial. Pada dimensi perkembangan sosial tersebut, di antaranya disebutkan: 1) mampu mengembangkan potensinya tanpa menimbulkan benturan baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat lingkungannya, 2) hubungan diri sendiri dengan orang lain tanpa merugikan dan melanggar hak-hak orang lain.

Realisasi logis dan konsep Cole di atas adalah suatu struktur masyarakat kota yang saling membutuhkan dan saling menghargai sehingga tercipta kondisi masyarakat kota yang koheren dan solid, walaupun dalam kondisi heterogen. Dan uraian tersebut, maka pihak yang sangat berpeluang untuk proaktif menerapkan konsep tersebut adalah pihak yang masuk dalam kategori "pemenang" (yang cenderung "*overload*") dalam kompetisi kehidupan kota. Realisasi yang lebih konkrit terhadap konsep tersebut adalah spesialisasi keahlian antar anggota masyarakat, sehingga timbul adanya kondisi saling membutuhkan dan ketergantungan pada masing-masing komunitas masyarakat kota.

Perilaku individualis masyarakat kota cenderung akan tercermin atau diungkapkan dalam suatu ungkapan fisik yang berupa batas ruang (*territory*) atau ungkapan bentuk. Ungkapan fisik yang berupa batas ruang (*territory*) bisa bersifat tetap atau suatu kondisi yang relatif tidak berubah-ubah, namun bisa juga bersifat tidak tetap. Ini sejalan dengan pendapat Lang<sup>13</sup>, bahwa teritorialitas adalah salah satu perwujudan ego yang tidak ingin diganggu, dan merupakan perwujudan dan privasi. Yang perlu diperhatikan adalah, apabila keinginan perwujudan privasi ini sangat berlebihan, hal ini merupakan indikasi dari sikap dan perilaku individualis.

Dengan kata lain, semakin pesatnya pembangunan Kota Metro, semakin terpelihara pula kelestarian lingkungan hidup di Kota Metro.

---

<sup>12</sup> Cole, Lawrence E. *Human Behavior, Psychology as Bio Social Science*, (New York: World Book Company, 1953)

<sup>13</sup> Lang Jon, *Creating Architectural Theor*, (New York: Reinhold Company Inc. . 1987).

Untuk mewujudkan strategi di atas, Pemda Kota Metro menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangan ini adalah: bagaimana menciptakan infrastruktur daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sekaligus menciptakan masyarakat yang berbudaya cinta lingkungan, menuju pembangunan kota yang berkelanjutan secara efektif dan efisien. Selain itu, Kota Metro juga menghadapi tantangan masyarakat yang telah memiliki kebiasaan turun temurun untuk mengelola sampah yang tidak ramah lingkungan dan juga mencoba melaksanakan berbagai pembenahan di segala bidang yang terkait dengan lingkungan hidup.

### **Strategi dan Program Peningkatan Kualitas Lingkungan di Kota Metro**

Secara sederhana, strategi pertama yang dilaksanakan oleh Pemda Kota Metro adalah penguatan infrastruktur kantor lingkungan hidup di daerah. Penguatan ini dimulai dengan penugasan beberapa orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman terkait lingkungan hidup, misalnya orang yang memiliki komitmen tinggi terhadap lingkungan hidup yang juga ditandai dengan beberapa penghargaan yang pernah diperolehnya. Selain itu, tetap pula dilakukan usaha-usaha peningkatan kompetensi sumber daya manusia di kantor lingkungan hidup secara berkesinambungan. Penguatan kelembagaan ini diharapkan bahwa kantor lingkungan hidup mampu menjadi pendorong/pelopor gerakan budaya cinta lingkungan sekaligus menjadi pembina/pengawas penerapan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup.

Dengan demikian, dengan terlaksananya pembinaan/pengawasan yang efektif dan efisien, akan tumbuh kesadaran masyarakat untuk taat hukum lingkungan. Setelah taat hukum, diharapkan masyarakat dengan sendirinya menumbuhkan kesadaran yang pada akhirnya berwujud pada budaya cinta lingkungan hidup.

Selanjutnya, sebagai salah satu bentuk komitmen penegakan hukum lingkungan hidup di Kota Metro, Pemda Kota Metro menjadikan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah terkait lingkungan hidup sebagai prioritas utama dalam Program Legislasi Daerah. Sampai dengan saat ini, Pemda Kota Metro telah banyak menerbitkan peraturan daerah, peraturan walikota dan instruksi walikota terkait lingkungan hidup. Penerbitan peraturan ini diikuti pula dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi (*to inform*) kepada masyarakat yang juga diikuti dengan penyampaian beberapa gambaran keadaan di kota-kota lain yang telah berhasil melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat luas tentang pentingnya usaha pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Langkah terpenting yang telah ditempuh oleh Pemda Kota Metro adalah dengan memberikan contoh/suri teladan dan terjun langsung ke lapangan (*to*

*inspire*) oleh setiap tingkat jabatan di Pemerintah Kota Metro kepada masyarakat luas, misalnya dengan bersepeda/berjalan kaki dari rumah menuju kantor, kegiatan jumat bersih secara rutin. Metode selanjutnya adalah dengan pengikutsertaan peran serta masyarakat secara aktif dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini bertujuan dalam rangka pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat.

Berikutnya, Pemda Kota Metro berupaya untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan keberlangsungan perubahan perilaku masyarakat secara berkesinambungan oleh penyiapan perilaku generasi berikutnya yang cinta akan lingkungan. Dengan demikian, Pemda Kota Metro memiliki strategi menumbuhkembangkan kecintaan terhadap lingkungan yang telah ditanamkan sejak usia dini melalui pendidikan di seluruh sekolah di Kota Metro.

Pemerintah daerah Kota Metro juga berusaha terus untuk meningkatkan kesadaran bersama dalam mengubah cara pandang dan cara memperlakukan sampah dengan benar serta ramah lingkungan, misalnya sampah adalah barang-barang yang masih dapat diberikan nilai tambah dan nilai jual.

Langkah berikutnya adalah Pemda Kota Metro melaksanakan pengembangan jejaring *multi-stakeholder* untuk memanfaatkan, mengelola dan mengembangkan sampah secara efektif, efisien, memenuhi standar teknis serta peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah. Selain itu, jejaring ini diharapkan merupakan forum untuk berdiskusi dan berpikir tentang masa depan dan kinerja penyediaan pelayanan pengelolaan sampah, pengembangan kapasitas dan kapabilitas anggotanya melalui koordinasi rutin untuk pelaksanaan pembangunan pengelolaan sampah di Kota Metro. Jejaring ini harus berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan. Beberapa bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dalam jejaring ini, antara lain: (1). Pembagian dan kerjasama pendanaan untuk operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan; (2). Penetapan teknologi tepat guna untuk pengolahan sampah; (3). Pengelolaan lingkungan secara terpadu.

Pemda Kota Metro sedang terus berupaya bersama-sama dengan *stakeholders* khususnya dalam dunia industri (produsen, importir, distributor, retailer, penjual) untuk menerapkan *extended producer responsibility* dalam pengelolaan sampah. Selain itu, Pemda Kota Metro sedang menginisiasi pembentukan bank sampah sebagai salah satu metode dalam pengelolaan sampah, pemilahan dan pengolahan sampah perlu dimulai dari sumber sampah, seperti: rumah, pemukiman/komplek perumahan, pabrik, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya serta pengelolaan sampah dengan menerapkan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Kantor Lingkungan Hidup Kota Metro telah melakukan pembinaan beberapa Bank Sampah yang ada beberapa kelurahan di Kota Metro. Pembinaan tersebut dilakukan dalam hal administrasi, teknis pemilahan dan pengelolaan

sampah, dan sampai pemberian bantuan sarana dan prasarana Bank Sampah melalui Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan Bank Sampah. Selain itu, KLH Kota Metro juga memfasilitasi Bank Sampah baru yang ingin mengembangkan usahanya dengan Bank Sampah yang telah lama terbentuk.

Dalam beberapa waktu lalu, pemerintah daerah Kota Metro melakukan sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup yang dilaksanakan pada Selasa 26 Juli 2016. Dalam pengarahannya Djohan mengingatkan pelaku usaha untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan memperhatikan semua perizinan dalam menjalankan usahanya.<sup>14</sup>

Sasaran kegiatan ini adalah pelaku usaha atau kegiatan di Kota Metro yang telah memiliki dokumen lingkungan baik berupa UKL-UPL maupun SPPL dan kami berharap dokumen yang telah mereka miliki dapat menjadi acuan dalam mengelola usaha atau kegiatan yang mereka jalankan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Kantor LH juga menggandeng Tim Teknis SKPD Kota Metro Erwin Djunaidi guna menyampaikan materi sosialisasi diantaranya mengenai izin lingkungan, penyampaian laporan implementasi Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), penyusunan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), serta pengelolaan persampahan.

Semua hal tersebut di atas merupakan dasar munculnya alur program kerja Pemda Kota Metro di bidang lingkungan hidup, antara lain:

1. Perencanaan, dengan identifikasi dan inventarisasi masalah, penetapan ekoregion, dan rencana perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup;
2. Pemanfaatan bersumber pada UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Perwali;
3. Strategi pengendalian melalui pencegahan kerusakan lingkungan hidup, pemulihan, dan penanggulangan;
4. Pemeliharaan dengan melakukan Konservasi Sumber Daya Alam, Pencadangan Sumber Daya Alam, dan Pelestarian Fungsi Atmosfir;
5. Strategi Pengawasan dan pembinaan, dilakukan terhadap usaha masyarakat, dan lembaga *profit*, penerapan peraturan lingkungan hidup, dan izin lingkungan;
6. Strategi Pembinaan/ Pengawasan/ Penegakan Hukum dengan melakukan sanksi: administrasi, perdata dan pidana.

Pemda Kota Metro juga terus mendorong dan menggerakkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang menjadi *supporting system* bagi perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Tata Kota, dan Dinas Pendidikan, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, Kantor Ketahanan

---

<sup>14</sup>Wakil walikota metro buka sosialisasi lingkungan hidup, dalam [http://www.metrokota.go.id/skpd/?kdskpdp=9&&page=berita\\_skpd&&no=316](http://www.metrokota.go.id/skpd/?kdskpdp=9&&page=berita_skpd&&no=316), diakses 18 Oktober 2016

Pangan, Dinas Pasar dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Koperasi, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta Badan Pengelola Keuangan Anggaran Daerah sebagai pendukung anggaran.

### Penutup

Pemda Kota Metro akan berupaya terus menerus menerapkan strategi dan melakukan terobosan-terobosan terbaru dalam rangka menumbuhkembangkan budaya cinta lingkungan pada seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung pembangunan Kota Metro yang berbasis *green economy*. Semua strategi dan program kerja ini tidak akan bisa berjalan dengan sendirinya dan berhasil dengan baik tanpa didukung oleh kerjasama semua lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, Pemda Kota Metro akan terus mendorong dan meningkatkan semangat kerja seluruh aparat pemerintah, memberdayakan masyarakat untuk mengubah perilakunya terhadap lingkungan hidup yang ada di Kota Metro. Selain itu, Pemda Metro pun terus meningkatkan kepedulian dan komitmennya terhadap perlindungan, pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup agar keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup seluruh warga kotanya terjamin, terarah, secara berkesinambungan agar pembangunan tetap berkelanjutan tanpa mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

### Daftar Pustaka

- Bintarto, *Interaksi Desa-Kota*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1989
- Cole, Lawrence E. *Human Behavior, Psychology as Bio Social Science*, (New York: World Book Company, 1953
- Lang Jon, *Creating Architectural Theor*, New York: Reinhold Company Inc. . 1987
- Lihat Anil Agarwal, et.al., *Hinduism and Ecology: The Intersection of Earth, Sky, and Water*. 2000,
- Lihat Mudhofir Abdullah, *Al-Qur'an & Konservasi Lingkungan* Jakarta: Dian Rakyat, 2010
- Sarlito. WS, *Psikologi Lingkungan*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 1992
- Sudarmono, Edi Ribut Harwanto, ed. *Metro: Desa Kolonis Menuju Metropolis [Metro: A Colonial Village Becoming Metropolitan]* (dalam Indonesian). Metro, Indonesia: Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Metro, 2004
- Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi`ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 2000

### Web

- Metro Selayang Pandang, <http://info.metrokota.go.id/selayang-pandang/>,
- Wakil walikota metro buka sosialisasi lingkungan hidup, dalam [http://www.metrokota.go.id/skpd/?kdskp=9&&page=berita\\_skpd&&n\\_o=316](http://www.metrokota.go.id/skpd/?kdskp=9&&page=berita_skpd&&n_o=316)
- <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/geografislj.php?ia=18&is=34>,